

HATI-HATI NYATAKAN KLAIM DUKUNGAN

Tim Heroe-Pena Ajak Tegakkan Kondusivitas Demokrasi

YOGYA (KR) - Tim pasangan calon Heroe Poerwadi dan Sri Widya Supena (Heroe-Pena) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menegakkan kondusivitas dalam berdemokrasi. Terutama dengan berhati-hati memberikan pernyataan ke publik terkait klaim dukungan di Pilkada Kota Yogya 2024.

Ketua Tim Pemenangan Heroe-Pena, Muhammad Sofyan, mengungkapkan saling klaim dukungan yang di dalamnya terdapat kabar bohong justru akan menjadi pembelajaran yang tidak baik bagi jalannya demokrasi.

"Kita semua sepatutnya menciptakan kondusivitas dalam Pilkada. Sehingga kami juga selalu terbuka untuk komunikasi dan klarifikasi baik dari paslon lain maupun media agar jangan sampai masyarakat diberi informasi yang tidak akurat," tandasnya dalam jumpa media, Rabu (23/10).

Pernyataan dan ajakan itu disampaikan berkaitan dengan adanya pemberitaan mengenai sejumlah partai non parlemen yang memberikan dukungan pada pasangan Afnan-Singgih. Pemberitaan itu disampaikan jika ada empat partai non parlemen yang berubah ke Afnan-Singgih yakni Hanura, PKN, Garuda dan Perindo. Belakangan tim

Afnan-Singgih mengklarifikasi jika Perindo tidak memberikan dukungan ke timnya melainkan Prima.

Atas informasi yang beredar tersebut, Koalisi Bersama Rakyat Jogja yang mengusung pasangan Heroe-Pena lantas melakukan konsolidasi hukum. Hal ini lantaran keempat partai yang disebutkan merupakan pengusung dan pendukung resmi pasangan nomor urut satu tersebut. "Kami juga langsung klarifikasi ke partai bersangkutan. Ternyata itu merupakan hoax atau berita

bohong dan membuat kami harus bersikap," tegas Muhammad Sofyan.

Menurutnya, terdapat tujuh partai pengusung dan dua partai pendukung pasangan Heroe-Pena. Tujuh partai pengusung tersebut ialah PAN, NasDem, Demokrat, Republik, Garuda, Perindo dan PKN. Sedangkan dua partai pendukung yakni Prima dan Hanura. Perwakilan dari partai pengusung dan pendukung juga turut dihadirkan dalam jumpa media kemarin.

Ketua DPD Perindo Kota



Tim Heroe-Pena menyampaikan ajakan untuk menjaga kondusivitas demokrasi.

Yogya RADIUS Simbolon, menyebut pernyataan yang mengisyaratkan partainya mendukung paslon lain merupakan fitnah kejam. Sejak awal pihaknya tetap konsisten berada di kubu nomor satu dan bahkan sudah melakukan penguatan hingga tingkat ranting. "Tidak pernah ada apa-apa tiba-tiba dikutip mendukung paslon lain. Ini masuk kategori fitnah. Sudah ada permintaan maaf dari yang mengutip dan kami pun memaafkan. Semoga ke depan tidak terjadi lagi seperti ini," urainya.

Senada disampaikan Ketua DPD Partai Garuda DIY Saiful Bahri. Dirinya menyebut, bentuk dukungan dibuktikan melalui surat rekomendasi yang diterbitkan oleh DPP. Hal itu merupakan sakral di tingkat partai karena telah tersistem dengan baik. Sehingga jika pihaknya dipropaganda mendukung paslon lain maka menciderai proses demokrasi.

Sementara pada kesempatan yang sama, Posko Pemenangan Heroe-Pena juga kedatangan relawan dari mantan anggota DPRD Kota Yogya yang memberikan dukungan. (Dhi)-f

Nuryadi, Kembali Pimpin DPRD DIY



Gubernur dan Wagub DIY bersama Ketua DPRD DIY dan Wakil DPRD DIY beserta istri usai pengucapan sumpah janji Pimpinan DPRD DIY Masa Jabatan 2024-2029.

YOGYA (KR) - Kursi Ketua DPRD DIY periode 2024-2029 kembali diduduki Nuryadi. Pelantikan pimpinan dewan (pinwan) dilangsungkan dalam rapat paripurna pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD DIY, Rabu (23/11). Politisi PDI Perjuangan tersebut didampingi tiga wakilnya, yakni Budi Waljiman dari Partai Gerindra, Umarudin Masdar (PKB) dan Imam Taufik (PKS). PKB terakhir mendapat kursi Pinwan periode 2004-2009.

Antara PKB dengan Partai Golkar di DPRD DIY sama-sama mendapatkan 6 kursi di DPRD DIY. Namun berdasarkan perolehan suara, PKB lebih tinggi. Ini kemudian yang membuat PKB mendapatkan kursi wakil ketua DPRD DIY.

Kepada pers, Ketua DPRD DIY Nuryadi mengatakan, setelah pelantikan mereka akan segera melakukan rapat untuk menentukan langkah berikutnya. Karena Pinwan itu bagian dari alat kelengkapan (alkap) dewan. Dimana didalamnya ada komisi, banggar dan yang lain.

"Jadi kita tidak hanya jalan berempet. Meskipun kita berasal dari partai yang berbeda, tujuan utama kita tetap untuk masyarakat DIY," katanya.

Untuk tata tertib (tatib) sudah kita selesaikan, tapi masih dievaluasi di pusat. Apakah kita akan menggunakan tatib lama atau baru, masih belum bisa diputuskan. Setelah alkab terbentuk,

maka kita akan bisa segera menyusun target-target secepatnya.

"Harapannya tentu bisa secepatnya. Agar kami bisa segera menyusun APBD 2025. Karena kalau sudah dekat dengan batas akhir, nanti akan buru-buru dan tidak bisa maksimal," ungkapnya.

Wakil Ketua DPRD DIY dari PKB Umaruddin Masdar mengaku tidak ada hal khusus karena partainya kembali mendapatkan kursi pimpinan. "Tidak ada perasaan khusus. Biasa saja, karena ke depan kita tetap harus kompak dan fokus menjalankan tugas lebih baik," katanya.

Gubernur DIY Sri Sultan HB X berharap kepada pimpinan DPRD periode 2024-2029 tersebut dapat mengemban amanah rakyat dengan baik. Pemda juga siap diajak kerjasama untuk kepentingan rakyat. "Kedepan masih banyak agenda pembangunan daerah yang harus dikedepankan dalam rangka pemberdayaan masyarakat hingga pengentasan kemiskinan," jelasnya.

Selain pimpinan, alkab di DPRD DIY adalah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia Khusus, Badan Musyawarah dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Daerah Istimewa.

(Awh/Bro)-f

FH UJB Visiting Profesor di Malaysia

YOGYA (KR) - Fakultas Hukum Universitas Janabradra Yogyakarta (FH UJB) melaksanakan Visiting Profesor di Fakultas Undang-Undang Universitas Kebangsaan Malaysia (FUU UKM) pada 15 Oktober 2024. Kegiatan mengangkat tema 'Revolutionizing Copyright in Music: Exploring AI Implementation Through Indonesia's Copyright Law'. Sebagai dosennya Prof Tomi Suryo Utomo SH LLM PhD.

Dr Sudyana SH MHum, Dekan FH UJB menyatakan, kegiatan visiting professor ini merupakan salah satu bagian dari Memorandum of Understanding (MoU) yang disepakati. Menurutnya, kerja sama bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi antara FH UJB dengan FUU-UKM di Kuala Lumpur Malaysia telah berjalan sejak 2021, bertujuan untuk memperkuat hubungan akademis antar kedua universitas serta meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian dalam bidang hukum.

"Melalui program ini, diharapkan terjadi pertukaran ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan Malaysia," kata Sudyana, Selasa (22/10). Kegiatan lainnya adalah research collaboration, pertukaran pelajar/mahasiswa yang dalam waktu dekat akan dilaksanakan.

Sesuai kepastian dari Prof Tomi Suryo Utomo, tema kuliah tamu kali ini adalah mengenai hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right). Menurut Prof Tomi, kekayaan intelektual memiliki berbagai bidang yang satu

sama lain saling terkait, dan merupakan hak eksklusif di mana orang lain tidak berhak untuk menggunakan, memiliki, memperbanyak, mengumumkannya tanpa seijin pemegang hak.

Dikatakan, bidang kekayaan intelektual termasuk sistem hukum Indonesia telah menganut paham individualis, baik atas kepemilikan orang perorangan, maupun kelembagaan seperti pemerintah atau organisasi masyarakat. Paham individualis ini secara de jure berlaku universal (global) sejak penandatanganan General Agreement on Tariff and Trade pada Putaran Uruguay (PU-GATT) di Marakas, Maroko tanggal 14 April 1994, yang diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1994. "Sejak itu harmonisasi hukum bidang ekonomi, termasuk bidang Hak Kekayaan Intelektual telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia," kata Prof Tomi.

Dekan FUU UKM Kuala Lumpur Malaysia, Dr Nurhafifah menyambut baik dan sangat antusias dengan kegiatan Visiting Profesor dari FH UJB. Dia juga berha-

rap agar kegiatan Tri Dharma Perguruan tinggi dapat ditingkatkan lebih lanjut, yaitu dengan kegiatan pertukaran pelajar/mahasiswa. Sebab dengan program pertukaran pelajar (student exchange) akan dapat menambah wawasan secara global bagi mahasiswa.

Di hadapan mahasiswa FUU UKM, Prof Tomi Suryo Utomo menjelaskan beberapa hal, antar lain menguraikan pengantar hukum di Indonesia, termasuk sistem dan karakteristik hukumnya. Membahas Hak Kekayaan Intelektual (HKI), mencakup terminologi, definisi, cabang-cabang HKI, serta prinsip-prinsip dasar HKI di Indonesia.

Selain itu memaparkan tentang pemanfaatan teknologi AI dalam industri musik berdasarkan perspektif UU Hak Cipta Indonesia. Menjelaskan pula mengenai berbagai tantangan hukum yang muncul akibat perkembangan teknologi AI serta perlunya revisi terhadap UU Hak Cipta Indonesia untuk mengakomodasi karya-karya yang dihasilkan oleh AI di bidang musik. (Dev)-f



Dr Sudyana dan Prof Tomi Suryo Utomo (tengah) saat visiting profesor di FUU UKM.

Kompetisi Internasional IBCF 2024 Siswa MAN 1 Yogyakarta Borong Medali

YOGYA (KR) - Siswa MAN 1 Yogyakarta yaitu Najwa Rise (kelas XI B) dan Muhammad Nafis Arfani (kelas X C) memborong medali di kompetisi internasional, The 4th International Bandung Choral Festival (IBCF), 14-20 Oktober 2024. Ini merupakan lomba paduan suara-choir dan solo singing yang diadakan di Bandung oleh PPAG Universitas Parahyangan, Bandung.

Najwa Rise berhasil mendulang tiga medali yaitu gold medal 2nd place (juara 2) kategori lagu folksong (lagu daerah), gold medal 2nd place (juara 2) kategori lagu pop n jazz, silver medal solo singing competition kategori youth (remaja). Sedangkan, Muhammad Nafis Arfani meraih gold medal 2nd place (juara 2) kategori lagu folksong (lagu daerah) dan gold medal 2nd place (juara 2) kategori lagu pop n jazz.

Najwa Rise menjelaskan, proses lomba diawali uji coba panggung di Gedung PPAG Parahyangan. Untuk

penyanyi solo dibagi beberapa kategori yaitu children, youth dan adult. Dari pemenang setiap kategori diambil untuk mengikuti ajang Grand Prix. "Alhamdulillah di solo singing competition, saya mendapatkan silver medal urutan ke-4 dari 15 peserta," katanya, Rabu (23/10).

Sedangkan untuk choir (paduan suara), Najwa tergabung dalam Gita Maizan Children Choir, untuk kategori pop n jazz serta folklore dan mendapat gold medal 2nd place di kedua kategori tersebut.

"Saya sangat senang dan bangga serta mendapat banyak pengalaman pembelajaran berharga juga bisa bertemu juri-juri internasional dari dalam dan luar negeri," ujarnya.

Kepala MAN 1 Yogyakarta, Drs H Wiranto Prasetyahadi MPd bersyukur prestasi yang ditorehkan oleh para siswanya ini (Najwa dan Nafis) semakin mengibarkan gaung nama MAN 1 Yogyakarta ke kancah interna-

sional. Menurutnya, dukungan teman, guru di sekolah serta sarana dan prasarana yang disediakan madrasah dapat dimanfaatkan dengan baik oleh kedua siswa tersebut. "Semoga ke depannya, prestasi-prestasi internasional semakin sering ditorehkan oleh siswaswisi MAN 1 Yogyakarta," tandasnya.

Festival tahun ini menampilkan 11 kategori yang mencakup berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bahkan, ada kategori khusus bagi paduan suara senior yang berusia di atas 50 tahun. Jenis musik yang diperlombakan juga beragam, mulai dari pop, jazz, religi, lagu rakyat, hingga musik sakral.

Festival menghadirkan juri internasional yang berkelas seperti Sencia Sanon dari Italia, Jean Baptiste-Bertrand dari Prancis, Dr Paul Head dari Amerika Serikat, dan Dr Edman Giat dari Filipina. Tak ketinggalan, juri lokal seperti Budi Utomo Prabowo dan Dina Primasti dari Indonesia. (Dev)-f

SIGIT WICAKSONO

Kembali Pimpin Fraksi, Ingatkan 'Bom Waktu' Kemacetan



KOTA YOGYAKARTA

kan potensi bom waktu kemacetan yang bisa menjadi persoalan pelik di Kota Yogya.

Pria yang juga menjabat Ketua DPD Partai NasDem Kota Yogya ini menilai persoalan kemacetan sama halnya dengan masalah sampah. Jika tidak diantisipasi sejak dini maka menjadi permasalahan seperti yang terjadi saat ini. "Masalah sampah ini sudah bisa kita lihat bagaimana kondisinya sekalarang. Begitu juga kemacetan, jika tidak diantisipasi sejak dini maka bisa menjadi bom waktu," tandasnya.

Potensi kemacetan tersebut sebenarnya juga sudah bisa dilihat dengan keberadaan Kota Yogya yang menjadi tujuan warga dari berbagai daerah. Baik untuk kepentingan pariwisata, studi banding, pendidikan maupun

pekerjaan. Tidak sedikit penduduk dari kabupaten lain yang sehari-hari beraktivitas di Kota Yogya. Apalagi setiap tahun jumlah kendaraan terus meningkat sementara kapasitas jalan di Kota Yogya sangat terbatas dan sulit untuk diperluas.

Oleh karena itu dibutuhkan kajian yang matang dengan melibatkan akademisi hingga praktisi agar mendapatkan kebijakan yang tepat. Kota Yogya juga tidak bisa memutuskan sendiri melainkan perlu kerja sama lintas daerah lantaran pergerakan lalu lintas dari kabupaten lain turut menyumbang kemacetan.

"Penanganan sampah juga tidak bisa dilakukan sendiri tetapi harus sinergi dengan kabupaten lain. Misalnya memperbanyak transportasi publik di lintas kabupaten. Yang jelas kebijakan itu harus didasari dengan kajian supaya tidak serampangan," imbuh pria 43 tahun ini.

Sigit yang rutin berolahraga setiap pagi merasakan sendiri bagaimana potensi kemacetan yang bisa menjadi momok di kemudian hari. Terutama semakin padatnya arus lalu lintas pada momentum tertentu seperti pagi dan sore hari, akhir pekan serta libur panjang. Ketika tidak segera diantisipasi dengan kebijakan yang terintegrasi maka semua harus siap menerima konsekuensi atau dampak kemacetan. (Dhi)-f



KR-Ardhi Wahdan

PENGUMUMAN TENTANG SERTIPIKAT HILANG						
Untuk mendapatkan Sertipikat baru sebagai pengganti Sertipikat yang hilang, berdasarkan ketentuan pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan bahwa:						
No	Pemohon	Nomor Hak	Nama Pemegang Hak	Alamat Pemegang Hak	Tanggal Pembukuan	No Berkas / No Pengumuman
1	BUDI WIDODO	112811041.00621	BUDI WIDODO	Desa Rakit Rt 03/01 Kec. Rakit Kab. Banjarnegara	29/10/2002	66835 /2024
2	AMAD NASRI	112804051.00092	WASRIP	Desa Petir Rt 01/02 Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara	23/03/1984	66841 /2024
3	DARSONO	112804091.00265	MARTAWIJAYA alias SUPADI	Desa Danaraja Kec. Purwanegara Kab. Banjarnegara	20/03/1984	66833 /2024
4	WAWAN PRAMONO	112805021.00103	WAWAN PRAMONO	Desa Kebondalem Rt. 01/01 Kec. Bawang Kab. Banjarnegara	14/12/2009	66838 /2024
5	SUCIYATI HJ	112811041.00089	SUTJIJATI	Desa Wanadadi Kec. Wanadadi Kab. Banjarnegara	16/07/1968	66836 /2024
6	LUSINAH	112806061.00008	1. TONI BUDIARSO 2. ANDI BUDIARSO 3. MOHAR 4. SITI NURMANINGSIH 5. LUSINAH 6. MARGONO 7. SITI SOFIANAH 8. JUNA HARTIWI 9. WIDI ASTUTI	Kel. Karangtengah Kec. Banjarnegara Kab. Banjarnegara	07/07/2009	66842 /2024

Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pengumuman ini, bagi mereka yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatan-keberatan kepada kami dengan disertai alasan dan bukti yang kuat. Jika setelah 30 (tiga puluh) hari tidak ada keberatan terhadap permohonan penggantian sertipikat tersebut diatas, maka sertipikat pengganti akan diterbitkan dan berlaku sah menurut hukum dan sertipikat yang dinyatakan hilang tidak berlaku lagi.

Banjarnegara, 17 Oktober 2024
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjarnegara
NURDIN KAREPESINA, S.SIT
NIP. 196706161991031004